OGI NEWS

OPEN GOVERNMENT INDONESIA

Kementerian PPN/ Bappenas

OPEN RESPONSE + OPEN RECOVERY

Open Government and Digital Governance in the Time of COVID-19

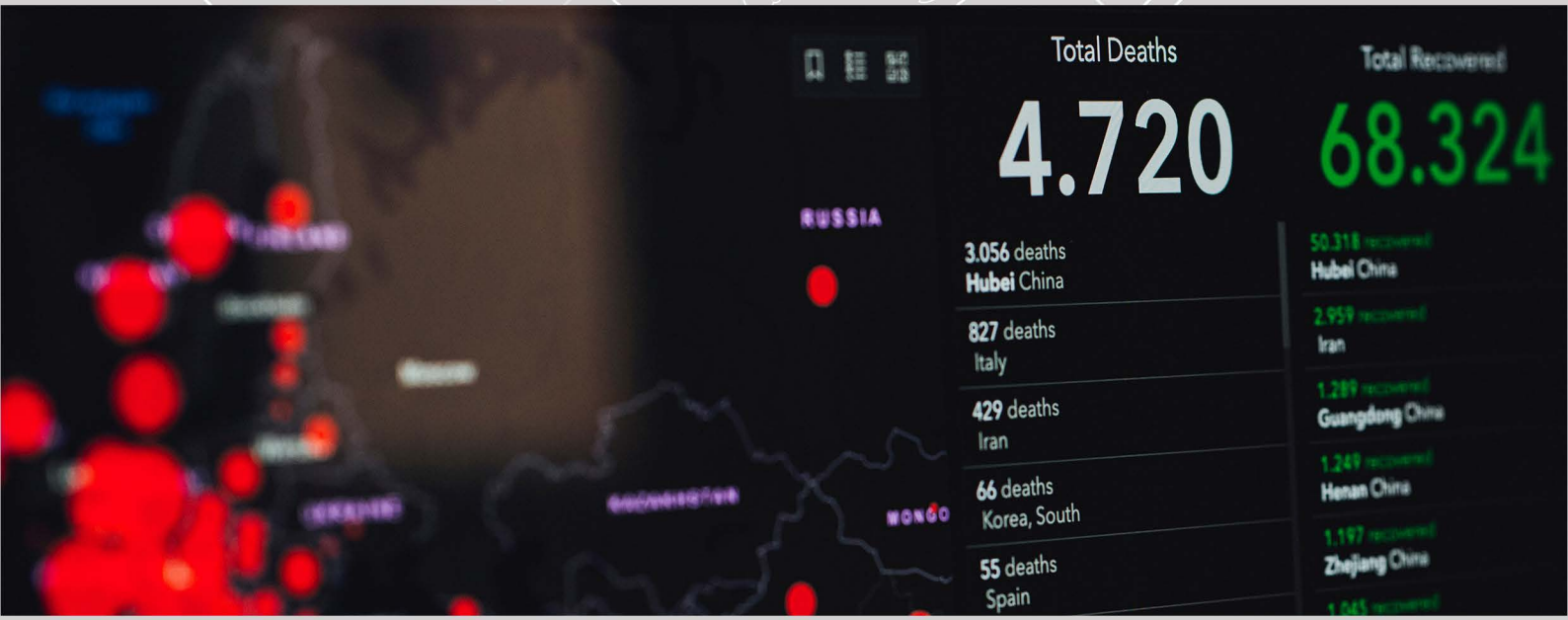

Gambar 1: Ilustrasi statistik jumlah kematian COVID-19
Sumber: Markus Spiske / Pexels

Penanganan COVID-19 telah melibatkan teknologi yang luar biasa dalam berbagai kegiatan, mulai dari memberikan informasi tentang penularan kepada publik hingga melacak individu yang terinfeksi secara real time. Akses ke internet dan platform daring sangat berguna untuk mendapatkan informasi yang tepat waktu. Pada saat yang sama, penggunaan teknologi digital juga menimbulkan risiko yang signifikan. Penyebaran informasi yang salah dan disinformasi dapat menggagalkan upaya pengelolaan pandemi. Selain itu, penggunaan pelacakan dan penelusuran aplikasi oleh beberapa pemerintah, tanpa perlindungan yang diperlukan telah menyebabkan pelanggaran hak pribadi. Kurangnya standar yang diakui secara global tentang penggunaan teknologi ini memperburuk masalah dan potensi penyalahgunaan. Diskusi kali ini akan bertujuan untuk membongkar langkah-langkah kebijakan yang terkait dengan penggunaan platform digital di saat-saat tanggap krisis, serta pertimbangan kebijakan yang penting untuk reformasi jangka panjang.

Robin Hodess, Direktur Tata Kelola & Transparansi di OGP, mengakui bahwa beberapa tahun terakhir, tata Kelola digital telah menjadi agenda prioritas. Menjadi bagian dari dunia digital menghubungkan individu untuk mengakses data yang tersedia kapanpun dan dimanapun. Dalam pandemi ini tata kelola digital semakin dirasakan peranannya. Permasalahan terletak pada data pemerintah dimana penyebaran info dan banyaknya aplikasi pelacakan membuat masyarakat sipil ingin mendorong negara untuk menggalakkan agenda prioritas tata kelola digital dengan mengedepankan aspek privasi individu.

Nnenna Nwakanma, Chief Web Advocate, World Wide Web Foundation, menyampaikan perspektif lain dari teknologi digital dimana resiko besar juga membayangi. Pihak yang mempunyai otoritas sedang menghadapi banyak tantangan karena semua menjadi terdigitalisasi secara paksa dalam masa pandemi ini. Dengan tingginya resiko, peluang untuk berkolaborasi dalam diseminasi informasi juga semakin tinggi. Pertanyaan besar bagi semua pemerintahan adalah bagaimana cara menghindari dampak digitalisasi? Dan bagaiamana tata kelola digital ditengah pandemi?

Henri Verdier, Ambassador for Digital Affairs, Government of France, menyampaikan banyak hal yang dapat dipelajari dalam krisis ini. Walaupun dunia memerlukan waktu yang lama untuk beradaptasi, kepercayaan publik terhadap

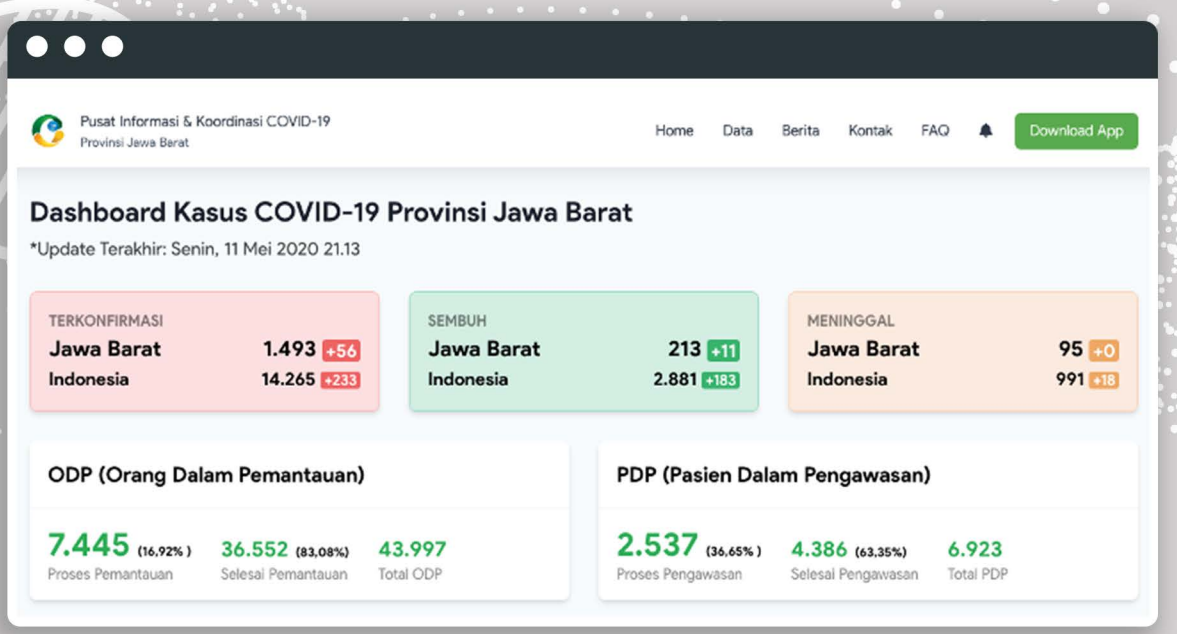

Gambar 2: Pusat Informasi & Koordinasi COVID-19 Jawa Barat
Sumber: https://pikobar.jabarprov.go.id/data

pemerintah harus dijaga. Pemerintah Perancis bekerja sama dengan perusahaan kecil, pemerintah daerah, dan perusahaan baru untuk berbagi algoritma ilmiah sumber terbuka dan mengembangkan strategi inovasi sumber terbuka untuk mengatasi krisis. Di Perancis, 23 minggu pertama menghadapi COVID-19 adalah masa-masa penuh tantangan hingga pemerintah membuka platform atau *open source* kepada publik dalam pengadaan ventilator. Pemerintah mendorong masyarakat untuk terlibat sebagai salah satu solusi penting dari pandemi.

Audrey Tang, Digital Minister Taiwan membagikan situasi COVID-19 di Taiwan yang notabene berhasil menahan penyebaran virus hingga tidak perlunya memberlakukan lockdown. Taiwan belum melaporkan kasus baru COVID-19 dalam hampir 4 minggu. Ia membagikan strategi digital Taiwan untuk mendekati krisis dengan pengarusutamaan gender dan rasa saling percaya antara masyarakat sipil dengan pemerintah melalui respon yang terbuka. Salah satu yang menarik dan berbeda dari negara Asia lainnya, Taiwan mengubah rumor menjadi humor. Contohnya, agar masyarakat tidak *panic buying*, mereka menjadikan infografis dan meme sebagai media agar orang-orang tetap tenang dan terinformasi.

Martha Tudón, Digital Rights Coordinator, ARTICLE 19, Mexico and Central America membagikan situasi di Meksiko mengenail *surveillance technology* atau teknologi pengawasan. Sama seperti di Indonesia, Meksiko juga merupakan salah satu negara yang tidak mempunya perlindungan data pribadi yang ketat. Teknologi pengawasan menyiratkan risiko serius terhadap hak asasi manusia. Tanpa perlindungan yang tepat di tempat seperti anonimitas dan enkripsi data, aplikasi pelacakan kontrak dapat membahayakan kebebasan berekspresi sekarang dan di luar wabah. Kebebasan informasi adalah perjuangan untuk tidak memberikan gagasan negatif tetapi pikiran positif untuk bergerak maju untuk dapat memverifikasi sumber sehingga akurat. Lalu mengapa teknologi pengawasan menjadi masalah bagi hak asasi manusia? Topik ini menjadi lebih penting lagi selama pandemi karena teknologi ini mengumpulkan informasi pribadi, seperti data kesehatan dan pelacak pergerakan di ruang publik dan pribadi. Pertama, kita tidak tahu siapa yang meluncurkan aplikasi dan apakah aman. Kemudian, tidak hanya dari segi hak asasi manusia tetapi pengawasan terus-menerus oleh pemerintah, dapat membahayakan orang-orang karena merasa diawasi. Pemerintah perlu memikirkan bagaimana perlindungan hak pribadi tetap dijunjung bakan ketika pandemi berakhir.

Martin Tisne, Managing Director, Luminate menyatakan kekhawatirannya mengenai data COVID-19. Implikasi pada data bersama yang akan digunakan memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan data. Harus ada jejaring pengaman yang akan memastikan perlindungan data individual dimana data yang digunakan tidak dapat digunakan untuk membahayakan orang lain. Negara-negara OGP perlu mulai melihat dan memikirkan akuntabilitas dan privasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mayoritas percakapan COVID-19 tentang privasi dan akuntabilitas telah difokuskan pada perlindungan data, dan meskipun penting, akuntabilitas algoritma data juga harus menjadi prioritas.